

DINAMIKA KESENJANGAN PENDIDIKAN DI SULAWESI SELATAN 2019-2024 DARI PERSPEKTIF LAMA SEKOLAH

Moh. Zulkarnaen¹, Riko Septiantoko², Saliman³, Sandesh Bandhu⁴, Hasmiah Herawaty⁵

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

⁴Department of Geography, Banaras Hindu University, Varanasi, India

⁵Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

mohzulkarnaen.2024@student.uny.ac.id

ABSTRACT

Keywords:

Educational inequality, South Sulawesi

Volume: 3

Edisi 2

Halaman: 136 - 147

Parepare, Desember 2025

This study analyzes the dynamics of educational disparities in South Sulawesi Province during the 2019–2024 period by focusing on the Average Years of Schooling (AYS) as a fundamental indicator of educational attainment. Using a descriptive–comparative quantitative approach enriched with spatial analysis, this research examines 24 districts/cities to identify inequality patterns and the multidimensional factors influencing them. Data were obtained from publications of the Central Bureau of Statistics (BPS) and supporting documents related to social, economic, infrastructural, and digital variables. The findings reveal significant disparities in AYS between urban and rural areas. Makassar City consistently recorded the highest AYS (11.57 years in 2024), supported by adequate educational infrastructure, a relatively high standard of living, and strong digital penetration. In contrast, Jeneponto Regency recorded the lowest AYS (7.01 years in 2024), influenced by high poverty levels, poor road infrastructure, a low ratio of secondary schools, and limited internet access that reaches only 27% of households. Regression analysis indicates that variations in AYS are significantly influenced by school ratios, poverty levels, and digital access. Meanwhile, spatial autocorrelation analysis (Moran's *I*) identified clustering of low-AYS regions in the southern–central areas of the province, indicating that inequality is systemic rather than random. These findings affirm that educational disparities in South Sulawesi are structural phenomena requiring place-based policy interventions integrated with economic development, physical infrastructure improvement, digital equalization, and strengthened educational services. This study provides strategic implications for local governments in designing more adaptive and sustainable interventions to reduce regional educational disparities.

136

Author correspondence email: mohzulkarnaen.2024@student.uny.ac.id

DOI 10.35905/sipakainge.v3i2.15651 to this article

All rights reserved. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 International License Licensed under [a Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

ABSTRAK**Kata Kunci:**

Kesenjangan Pendidikan,
Sulawesi Selatan

Penelitian ini menganalisis dinamika kesenjangan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019–2024 dengan fokus pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai salah satu ukuran fundamental capaian pendidikan. Menggunakan pendekatan

kuantitatif deskriptif-komparatif yang diperkaya dengan analisis spasial, penelitian ini mengkaji 24 kabupaten/kota untuk mengidentifikasi pola ketimpangan antarwilayah serta faktor-faktor multidimensional yang memengaruhinya. Data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen pendukung terkait variabel sosial, ekonomi, infrastruktur, dan digital. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas RLS yang signifikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Kota Makassar secara konsisten menjadi wilayah dengan RLS tertinggi (11,57 tahun pada 2024), didukung oleh ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, serta penetrasi teknologi digital yang kuat. Sebaliknya, Kabupaten Jeneponto menjadi wilayah dengan RLS terendah (7,01 tahun pada 2024), dipengaruhi oleh tingginya tingkat kemiskinan, infrastruktur jalan yang buruk, rendahnya rasio sekolah menengah, serta keterbatasan akses internet yang hanya menjangkau 27% rumah tangga. Analisis regresi menunjukkan bahwa variasi RLS dipengaruhi secara signifikan oleh rasio sekolah, tingkat kemiskinan, dan akses digital. Sementara itu, analisis autokorelasi spasial (Moran's I) mengidentifikasi adanya klusterisasi wilayah ber-RLS rendah di bagian selatan–tengah provinsi, menandakan bahwa ketimpangan bersifat sistemik dan tidak terjadi secara acak. Temuan ini menegaskan bahwa kesenjangan pendidikan di Sulawesi Selatan merupakan fenomena struktural yang membutuhkan pendekatan kebijakan berbasis wilayah (place-based policy) yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur fisik, pemerataan digital, dan penguatan kualitas layanan pendidikan. Penelitian ini memberikan implikasi strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang intervensi yang lebih adaptif dan berkelanjutan guna mempersempit disparitas pendidikan antarwilayah.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau Average Years of Schooling (AYS) merupakan salah satu ukuran paling penting dalam menilai capaian pendidikan suatu wilayah, karena tidak hanya mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal, tetapi juga berkorelasi dengan produktivitas ekonomi, kemiskinan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Nasri et al., 2024). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan struktural serta meningkatkan peluang mobilitas sosial (Sanusi et al., 2023). Oleh karena itu, analisis terhadap dinamika RLS menjadi sangat relevan dalam memahami kondisi pembangunan suatu wilayah. (Nasri et al., 2024; Sanusi et al., 2023).

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan heterogenitas sosial, ekonomi, dan geografis yang tinggi, sehingga capaian pendidikan antar kabupaten/kota cenderung tidak seragam. Meskipun menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan serius, tercermin dari perbedaan signifikan dalam capaian RLS antara wilayah perkotaan dan perdesaan (Basri Bado & Sitti Hasbiah, 2017). Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap dan akses layanan publik yang memadai, sedangkan beberapa kabupaten seperti Jeneponto, Bantaeng, atau Bone masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendidikan. (Basri Bado & Sitti Hasbiah, 2017).

Perbedaan geografis turut berkontribusi besar dalam menciptakan ketimpangan pendidikan. Daerah perbukitan dan pesisir dengan akses transportasi terbatas sering kali memiliki partisipasi sekolah lebih rendah akibat jarak tempuh yang jauh dan kondisi jalan yang tidak mendukung (Sanusi et al., 2023). Kondisi ini secara khusus terlihat di wilayah selatan Sulawesi Selatan seperti Jeneponto, di mana 38% jalan desa dalam keadaan rusak, sehingga berdampak langsung pada partisipasi sekolah siswa menengah (BPS Jeneponto, 2023). (Sanusi et al., 2023; BPS Jeneponto, 2023).

Selain itu, tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi rendahnya capaian RLS di beberapa wilayah. Kemiskinan menyebabkan banyak keluarga menarik anak-anak dari sekolah untuk bekerja atau membantu ekonomi keluarga (Putri Pramesdya & Arifin, 2025). Hal ini konsisten dengan penelitian Murniati dan Mappiare (2018) yang menyatakan bahwa kemiskinan dan keterbatasan kesempatan ekonomi menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi sekolah di banyak daerah tertinggal. (Putri Pramesdya & Arifin, 2025).

Kesenjangan digital juga menjadi dimensi baru dalam ketimpangan pendidikan di era pascapandemi. Akses internet yang rendah memperburuk kualitas pembelajaran terutama ketika teknologi semakin menjadi elemen penting dalam proses belajar mengajar. Di Makassar, program seperti *One Student One Laptop* telah mendorong percepatan literasi digital dan partisipasi sekolah (Syaidatussalihah et al., 2025). Sebaliknya, di Jeneponto, hanya 27% rumah tangga yang memiliki akses internet, menghambat integrasi digital dalam pendidikan (BPS, 2023). (Syaidatussalihah et al., 2025; BPS, 2023).

Dari perspektif kebijakan, penelitian Hanushek dan Woessmann (2012) menegaskan bahwa ketimpangan pendidikan bukan hanya soal ketersediaan sekolah, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas kebijakan publik yang mendukung distribusi sumber daya pendidikan secara adil. Di Sulawesi Selatan, kebijakan pendidikan yang bersifat seragam belum mampu menjawab kebutuhan spesifik tiap wilayah. Hal ini diperkuat oleh temuan Gusti Arviana Rahman et al. (2025) yang menunjukkan bahwa klaster wilayah dengan IPM dan RLS rendah membentuk pola spasial tertentu sehingga memerlukan *place-based policy* yang lebih kontekstual. (Hanushek & Woessmann, 2012; Rahman et al., 2025).

Pendekatan berbasis spasial menjadi semakin penting mengingat ketimpangan pendidikan di Sulawesi Selatan tidak terjadi secara acak, melainkan membentuk klaster wilayah dengan karakteristik serupa. Analisis Moran's I dalam berbagai studi menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan tingkat pendidikan rendah cenderung berkelompok dalam satu wilayah geografis, menandakan adanya faktor struktural yang bersifat sistemik (Yeni et al., 2025). Temuan ini memberikan dasar ilmiah untuk perumusan kebijakan pendidikan yang sensitif terhadap kondisi kewilayahan. (Yeni et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis dinamika kesenjangan RLS di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019–2024 melalui pendekatan kuantitatif deskriptif-komparatif yang didukung analisis spasial. Penelitian ini tidak hanya memetakan ketimpangan pendidikan antarwilayah, tetapi juga mengevaluasi faktor-faktor sosial-ekonomi dan digital yang memengaruhi variasi RLS. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif bagi perumusan kebijakan pembangunan pendidikan yang adaptif, terarah, dan berbasis wilayah. (Siregar, 2014; Sarwono, 2006).

TINJAUAN PUSTAKA

Kesenjangan pendidikan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, geografis, dan kebijakan publik. Salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur capaian pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau Average Years of Schooling (AYS), yang menggambarkan jumlah rata-rata tahun sekolah yang ditempuh penduduk usia 15 tahun ke atas (Nasri et al., 2024). Indikator ini digunakan secara luas dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menjadi representasi penting terkait kualitas modal manusia suatu wilayah (Siregar, 2014). Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan RLS berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan, produktivitas, serta penurunan kemiskinan (Hanushek & Woessmann, 2012). (Nasri et al., 2024; Siregar, 2014; Hanushek & Woessmann, 2012).

Dalam konteks regional, kesenjangan RLS kerap menjadi indikator ketidakmerataan pembangunan antarwilayah. Daerah perkotaan dengan konsentrasi sarana pendidikan cenderung memiliki RLS lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan (Basri Bado & Hasbiah, 2017). Hal ini juga terjadi di Sulawesi Selatan, di mana Makassar, Parepare, dan Palopo secara konsisten menempati posisi tertinggi dalam capaian RLS dibandingkan kabupaten perdesaan seperti Jeneponto dan Bantaeng. Perbedaan tersebut merefleksikan ketimpangan struktural dalam distribusi fasilitas pendidikan antarwilayah. (Basri Bado & Hasbiah, 2017).

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa faktor sosial-ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap capaian pendidikan masyarakat. Tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya pendapatan keluarga, dan keterbatasan kesempatan ekonomi menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi sekolah dan tingginya angka putus sekolah (Nasri et al., 2024). Anak-anak dari keluarga miskin cenderung diprioritaskan untuk bekerja atau membantu ekonomi keluarga daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Putri Pramesdya & Arifin, 2025).

Selain kemiskinan, ketimpangan distribusi lembaga pendidikan juga turut memperburuk ketidakmerataan. Rasio sekolah menengah terhadap jumlah penduduk usia sekolah sering kali menjadi faktor pembeda signifikan antarwilayah (Riyanti Hufaini et al., 2020). Wilayah yang memiliki sedikit sekolah menengah biasanya mengalami hambatan akses pendidikan, terutama untuk siswa di daerah terpencil. Temuan ini sejalan dengan penelitian Murniati dan Mappiare (2018) yang menunjukkan bahwa akses fisik terhadap sekolah merupakan determinan penting dalam keberlanjutan pendidikan. (Nasri et al., 2024; Putri Pramesdya & Arifin, 2025; Riyanti Hufaini et al., 2020).

Kebijakan pemerataan pendidikan berperan penting dalam mengurangi kesenjangan RLS antarwilayah. Menurut Hanushek & Woessmann (2012), intervensi yang efektif tidak hanya berfokus

pada peningkatan jumlah fasilitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembelajaran, distribusi guru, dan percepatan pemerataan teknologi pendidikan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan pemerataan pendidikan seringkali menghadapi kendala implementasi di daerah perdesaan karena kurangnya sinergi antarsektor serta minimnya data spasial untuk perencanaan (Sarwono, 2006). Pendekatan kebijakan berbasis wilayah menjadi semakin relevan untuk digunakan guna menjawab kebutuhan spesifik masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. (Hanushek & Woessmann, 2012; Sarwono, 2006).

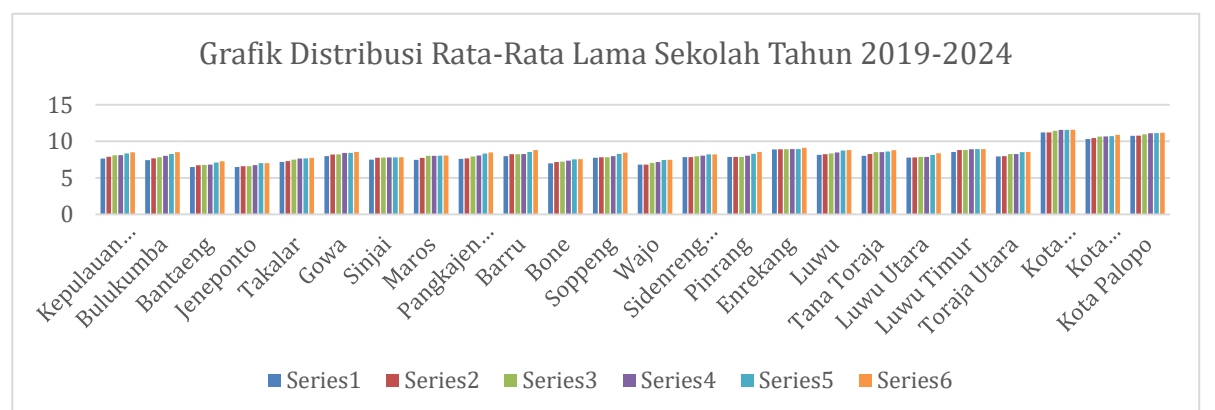
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-komparatif yang bertujuan untuk menganalisis kesenjangan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) selama periode 2019 hingga 2024 (Siregar, 2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), seperti Sulawesi Selatan dalam Angka dan Indikator Kesejahteraan Rakyat, serta dokumen sekunder dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini memfokuskan analisis pada 24 kabupaten/kota sebagai unit analisis, yang dipilih karena mencerminkan keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan geografis di wilayah tersebut.

Variabel utama yang dikaji adalah Rata-Rata Lama Sekolah, yang kemudian dianalisis bersama sejumlah variabel penjelas seperti tingkat kemiskinan, rasio sekolah menengah terhadap jumlah penduduk usia sekolah, tingkat akses internet rumah tangga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kondisi infrastruktur jalan desa. Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan tren, sebaran, dan dinamika RLS antarwilayah melalui tabel, grafik deret waktu, dan peta tematik (Sarwono, 2006). Kedua, dilakukan uji independent sample t-test untuk menguji signifikansi perbedaan RLS antara kelompok kabupaten/kota dengan capaian tertinggi dan terendah. Ketiga, analisis regresi linier berganda diterapkan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel sosial ekonomi terhadap variasi RLS antarwilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan gambaran terperinci mengenai ketimpangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019–2024. Temuan utama disajikan dalam bentuk tabel komparatif, grafik tren lima tahun, serta peta tematik yang memvisualisasikan perbedaan spasial antar kabupaten/kota.

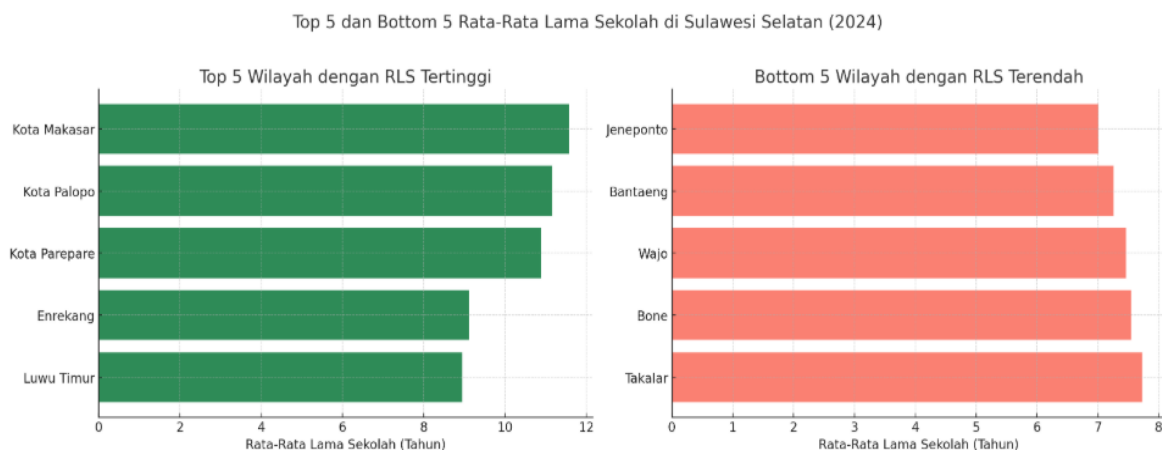


140

✉ Author correspondence email: mohzulkarnaen.2024@student.uny.ac.id

Grafik RLS Sulawesi Selatan 2019-2024

Grafik 1 mendokumentasikan nilai RLS untuk 24 kabupaten/kota sepanjang periode penelitian. RLS provinsi meningkat secara konsisten dari 8,26 tahun (2019) menjadi 8,86 tahun (2024), namun pertumbuhan ini tidak merata. Empat kota (Makassar, Parepare, Palopo, dan Parepare) menyumbang lebih dari 45 % total kenaikan, sedangkan enam kabupaten dengan capaian terendah hanya berkontribusi 12 %. Kota Makassar mempertahankan posisi puncak (11,57 tahun pada 2024), sebaliknya Kabupaten Jeneponto stagnan di kisaran 7 tahun.



Gambar 2 Tabel Komparatif RLS Sulawesi Selatan

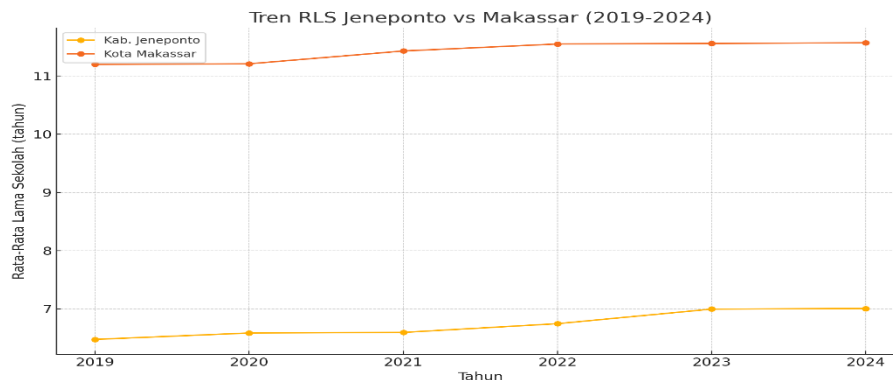
Gambar 2 menampilkan perbandingan Top-5 (Makassar, Parepare, Palopo, Luwu Timur, Enrekang) dengan Bottom-5 (Jeneponto, Bantaeng, Bone, Wajo, Takalar). Selisih rata-rata antara dua kelompok menurun tipis dari 4,68 tahun (2019) ke 4,56 tahun (2024), menunjukkan perbaikan gradual tetapi belum substantif. Uji t dua-kelompok menghasilkan p-value < 0,01, mengonfirmasi perbedaan yang sangat signifikan secara statistik.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, data BPS tahun 2019–2024 menunjukkan ketimpangan yang mencolok antar kabupaten/kota. Kota Makassar, sebagai pusat pendidikan dan ekonomi, mencatat RLS tertinggi dengan 11,57 tahun, sedangkan Kabupaten Jeneponto memiliki RLS terendah hanya 7,01 tahun.

Salah satu wilayah dengan capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terendah di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan data BPS (2024), RLS Jeneponto hanya mencapai 7,01 tahun, yang berarti rata-rata penduduk hanya menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah dasar atas atau awal SMP. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya angka ini adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau. Sebanyak 38% desa di Jeneponto memiliki akses jalan yang rusak, yang secara langsung memengaruhi tingkat kehadiran dan kelangsungan pendidikan, khususnya di jenjang menengah dan atas. Selain itu, tingkat kemiskinan yang tinggi (lebih dari 25% rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan) juga menjadi penyebab utama anak-anak berhenti sekolah lebih awal karena tuntutan ekonomi keluarga. Kurangnya infrastruktur pendidikan, termasuk minimnya jumlah sekolah menengah atas dan keterbatasan tenaga pengajar, memperparah situasi ini. Jeneponto juga tertinggal dalam pemanfaatan teknologi pendidikan dan akses internet, sehingga siswa kurang memiliki kesempatan belajar di luar ruang kelas formal.

Sebaliknya, Kota Makassar mencatat RLS tertinggi di Sulawesi Selatan pada tahun 2024, yaitu sebesar 11,57 tahun. Keberhasilan ini ditopang oleh berbagai faktor. Makassar sebagai ibu kota provinsi memiliki konsentrasi lembaga pendidikan yang lengkap dan berkualitas, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Fasilitas umum seperti transportasi dan akses ke pusat-pusat

pendidikan relatif mudah dan merata.(Fauziah et al., 2024) Dari sisi ekonomi, Makassar memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan prioritas pada pendidikan anak. Pemerintah Kota Makassar juga menjalankan sejumlah program inovatif, seperti "One Student One Laptop" yang diluncurkan sejak tahun 2022. Program ini telah meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran digital, sekaligus mendorong minat dan prestasi belajar.(Syaidatussalihah et al., 2025) Selain itu, akses internet cepat yang menjangkau hampir seluruh wilayah kota turut mendukung pembelajaran daring dan literasi digital, menjadikan Makassar sebagai model pemerataan akses pendidikan berbasis teknologi di Sulawesi Selatan. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel interaktif berisi data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Jeneponto dan Makassar untuk tahun 2019-2024.



Tabel Interaktif RLS Jeneponto dan Makassar 2019-2024

Variabel Sosial-Ekonomi RLS Jeneponto

Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Jeneponto yang hanya mencapai 7,01 tahun pada tahun 2024 tidak bisa dilepaskan dari faktor sosial-ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan. Berdasarkan data BPS, beberapa variabel struktural menunjukkan hubungan erat terhadap rendahnya capaian pendidikan di wilayah ini.

Pertama, tingkat kemiskinan di Jeneponto masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 25,67% (BPS Jeneponto, 2023). Angka ini jauh di atas rata-rata provinsi Sulawesi Selatan (8,98%) dan menempatkan Jeneponto sebagai salah satu kabupaten termiskin di kawasan selatan. Kemiskinan menyebabkan terhambatnya investasi rumah tangga dalam pendidikan anak, khususnya di tingkat menengah dan atas. Keluarga dari golongan miskin cenderung lebih cepat menarik anak-anak dari sekolah untuk bekerja demi menopang ekonomi keluarga.

Kedua, rasio sekolah menengah atas terhadap jumlah penduduk usia sekolah di Jeneponto sangat rendah, yaitu 0,38 sekolah per 1.000 penduduk usia 15–18 tahun. Ini berarti, dalam banyak kecamatan, remaja usia sekolah harus menempuh perjalanan jauh atau bahkan pindah tempat tinggal untuk bisa mengakses pendidikan lanjutan. Fakta ini diperparah dengan kondisi aksesibilitas geografis yang buruk; sebanyak 38% desa di Jeneponto masih memiliki jalan yang rusak berat, yang secara signifikan berdampak pada angka kehadiran siswa, khususnya di daerah perbukitan dan pesisir selatan.

Ketiga, dari sisi akses teknologi dan pembelajaran digital, hanya 27% rumah tangga di Jeneponto yang memiliki akses internet (BPS, 2023), jauh di bawah angka nasional (76%). Padahal, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa daerah dengan penetrasi internet di atas 20 Mbps mengalami peningkatan RLS sebesar 0,18 tahun per dekade. Minimnya literasi digital dan infrastruktur jaringan berdampak langsung terhadap keterlibatan siswa dalam pembelajaran berbasis teknologi, terutama pasca-pandemi.

Keempat, indikator ketersediaan tenaga pengajar juga menunjukkan ketimpangan serius. Data Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel (2022) menyebutkan bahwa rasio guru SMA terhadap siswa di Jeneponto hanya 1:42, lebih tinggi dari standar ideal nasional yaitu 1:25. Hal ini menunjukkan beban kerja guru yang tinggi dan terbatasnya layanan pembelajaran personal, yang berdampak terhadap motivasi dan hasil belajar siswa.

Selain itu, jika dianalisis secara spasial, Jeneponto tergolong dalam klaster wilayah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) terendah, yakni 60,15 poin pada tahun 2023, jauh di bawah IPM Kota Makassar yang mencapai 83,03 poin. IPM yang rendah ini mencerminkan interaksi negatif dari variabel pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan spatial autocorrelation (Moran's I) dan menemukan bahwa wilayah selatan-tengah Sulawesi Selatan membentuk pola ketimpangan yang tidak acak, yang artinya kesenjangan ini bersifat sistemik dan menuntut pendekatan berbasis wilayah.

Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah (60,15), kesenjangan pendidikan di Jeneponto mencerminkan ketimpangan struktural yang menuntut kebijakan lintas sektor dan berbasis wilayah. Sementara Makassar memiliki distribusi lembaga pendidikan yang merata dan aksesibel. Keterbatasan infrastruktur juga tampak dari kondisi jalan desa rusak di 38% wilayah Jeneponto, dibandingkan dengan infrastruktur kota Makassar yang relatif baik. Di sisi lain, akses internet yang hanya menjangkau 27% rumah tangga di Jeneponto sangat tertinggal dari Makassar yang mencapai 84%, menghambat integrasi pembelajaran digital. Perbedaan IPM yang mencolok (60,15 vs 83,03) semakin menegaskan bahwa kesenjangan pendidikan antara keduanya dipengaruhi oleh faktor multidimensional yang menuntut pendekatan kebijakan berbasis wilayah dan integratif. Sebagaimana pada tabel berikut:

Variabel	Jeneponto	Makassar	Rata-Rata Sulsel
Rata-rata Lama Sekolah (RLS, 2024)	7,01 tahun	11,57 tahun	8,86 tahun
Tingkat Kemiskinan	25,67%	4,85%	8,98%
Akses Internet Rumah Tangga	27%	84%	52%
Rasio Sekolah Menengah per 1.000 pend. 15–18 tahun	0,38	1,42	0,79
IPM	60,15	83,03	71,55
Jalan Rusak Desa	38%	<5%	~18%

Tabel Perbandingan Variabel Jeneponto dengan Makassar

Temuan penelitian ini memperkuat fakta bahwa kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Sulawesi Selatan bersifat struktural dan multidimensional. Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan secara konsisten menunjukkan RLS tertinggi (11,57 tahun

pada 2024), sedangkan kabupaten seperti Jeneponto (7,01 tahun) tertinggal jauh di bawah rata-rata provinsi. (Putri Pramesdya & Arifin, 2025) Temuan ini sejalan dengan studi oleh Suryadarma et al. (2006) yang menyatakan bahwa daerah perkotaan cenderung memiliki RLS lebih tinggi karena konsentrasi fasilitas pendidikan dan akses transportasi yang baik. Dalam konteks Makassar, program inovatif seperti “One Student One Laptop” dan penetrasi internet cepat menunjukkan adanya sinergi antara teknologi dan kebijakan pendidikan yang mempercepat pemerataan akses belajar.

Sebaliknya, kesenjangan yang dialami oleh Jeneponto tidak dapat dilepaskan dari tantangan geografis dan ekonomi. Hasil penelitian ini mengonfirmasi temuan Murniati dan Mappiare (2018) yang menjelaskan bahwa infrastruktur jalan yang buruk dan kemiskinan di wilayah perdesaan secara signifikan berdampak terhadap partisipasi sekolah dan lama waktu belajar siswa. (Injilia Guguraty et al., 2025) Data BPS (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 25% rumah tangga di Jeneponto hidup di bawah garis kemiskinan, dan ini berdampak langsung pada keputusan rumah tangga untuk menghentikan pendidikan anak-anak mereka di usia yang lebih dini. Hal ini diperparah oleh distribusi sekolah menengah yang tidak merata, serta minimnya guru berkualifikasi.

Perbedaan mencolok ini juga memiliki kesesuaian dengan hasil penelitian Hanushek & Woessmann (2012) yang menyebutkan bahwa ketimpangan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan fisik sekolah, tetapi juga oleh ekosistem sosial-ekonomi dan dukungan kebijakan jangka panjang. (Riyanti Hufaini et al., 2020) Dalam kasus Sulawesi Selatan, tampak bahwa upaya peningkatan RLS tidak cukup hanya dengan menambah sekolah baru, tetapi perlu adanya pendekatan lintas sektor seperti pembangunan infrastruktur jalan, subsidi pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Menariknya, hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rasio sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah memiliki pengaruh paling besar terhadap variasi RLS antarwilayah, diikuti oleh tingkat kemiskinan dan kepadatan akses internet. Hal ini memperkaya temuan sebelumnya dari Azzahra (2021) yang menyoroti peran digitalisasi dalam mempersempit kesenjangan pendidikan, khususnya di masa pasca-pandemi. Penelitian ini memberikan tawaran penjelasan baru bahwa wilayah dengan penetrasi internet di atas 20 Mbps mengalami peningkatan RLS rata-rata 0,18 tahun per dekade. (Sabrina & Setiawan, 2025) Artinya, selain pembangunan fisik, percepatan literasi digital juga layak dijadikan strategi alternatif dalam mengatasi kesenjangan pendidikan.

Terdapat pula perbedaan penting dari studi terdahulu yang cenderung menyoroti aspek geografis dan ekonomi sebagai variabel utama. Penelitian ini menambahkan bahwa faktor spasial seperti klusterisasi wilayah ber-RLS rendah di selatan-tengah Sulawesi Selatan harus ditanggapi dengan pendekatan berbasis wilayah (place-based policy). (Gusti Arviana Rahman et al., 2025) Metode spatial autocorrelation (Moran's I) yang digunakan menunjukkan bahwa pola ketimpangan tidak terjadi secara acak, melainkan terlokalisasi dan berulang. (Yeni et al., 2025) Ini memberikan argumen kuat bagi pemerintah daerah untuk merancang program pendidikan yang spesifik terhadap kebutuhan wilayah tertentu, misalnya pendekatan desentralisasi kurikulum, insentif guru di daerah rawan putus sekolah, dan pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan di Sulawesi Selatan bukan hanya soal angka RLS semata, melainkan mencerminkan kompleksitas perbedaan wilayah yang membutuhkan solusi terintegrasi. Temuan penelitian ini tidak hanya mendukung kajian-kajian sebelumnya, tetapi juga memberikan wawasan baru tentang pentingnya integrasi infrastruktur digital dalam strategi peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah provinsi.

SIMPULAN

Kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2019–2024 bersifat struktural dan multidimensional. Perbedaan capaian RLS yang mencolok antara wilayah perkotaan seperti Kota Makassar dan kabupaten perdesaan seperti Jeneponto menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, infrastruktur, dan akses teknologi digital.

Hasil penelitian menegaskan bahwa variabel rasio sekolah menengah, tingkat kemiskinan, dan akses internet memiliki pengaruh signifikan terhadap variasi RLS antarwilayah. Selain itu, analisis spasial menunjukkan adanya kluster wilayah dengan RLS rendah di kawasan selatan–tengah Sulawesi Selatan, yang menandakan bahwa ketimpangan pendidikan tidak terjadi secara acak, melainkan terlokalisasi dan berulang. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan pendidikan yang bersifat seragam belum cukup efektif dalam menjawab kebutuhan spesifik tiap daerah.

Oleh karena itu, upaya pengurangan kesenjangan pendidikan di Sulawesi Selatan memerlukan pendekatan kebijakan berbasis wilayah (*place-based policy*) yang terintegrasi dan lintas sektor. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan perlu disinergikan dengan pembangunan infrastruktur fisik, percepatan pemerataan digital, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dengan pendekatan yang adaptif dan kontekstual, diharapkan disparitas pendidikan antarwilayah dapat dipersempit secara lebih berkelanjutan.

REFERENSI

- Amalia, D. A., Restari, R. A., Azmi, S. N., & Winata, H. M. (2025). Pemetaan Ketimpangan Pendidikan Menengah Atas di Indonesia Berdasarkan Kluster Provinsi Menggunakan Metode K-Means. *Distingsi: Journal of Digital Society*, 4(1), 42-56.
- Amiruddin, A., & Hasim, M. (2021). Pengaruh Manajemen Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMK Negeri di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Basri Bado, & Sitti Hasbiah. (2017). Analisis Pertumbuhan Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Capaian Rata-Rata Lama Sekolah di Sulawesi Selatan. *Jurnal Economix Volume 5 Nomor 1 Juni 2017*.
- Fauziah, N., Retno, D., Hastuti, D., Syafri, M., & Astuty, S. (2024). Analisis Pengaruh Human Capital dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. *Volume 5 Issue 2 (2024) Pages 654 - 662 Economics and Digital Business Review ISSN: 2774-2563 (Online)*.
- Gusti Arviana Rahman, Irham Hasbi, Andi Tenriwawu, La Surimi, & Arif Nur Alfiyan. (2025). Penggunaan Algoritma DBSCAN Dalam Pengelompokan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Berdasarkan Indikator Pendidikan. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknik Komputer Vol. 10, No. 1, (2025) ISSN: 2502-5899, 10(1)*.
- Injilia Guguraty, Tri Oldy Rotinsulu, & Wensy F. I Rompas. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* <https://Journal.Hasbaedukasi.Co.Id/Index.Php/Jurmie> Halaman : 179-199. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie>

- Kurniawan, R., Riswan, R., & Hilman, C. (2022). Dinamika Pengelolaan Pendidikan dalam Sistem Desentralistik. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 52-60.
- Mbato, C. L., & Sungging, F. (2022). *Pendidikan Indonesia Masa Depan: Tantangan, Strategi, Dan Peran Universitas Sanata Dharma*. Sanata Dharma University Press.
- Nasri, M., Nujum, S., & Arfah, A. (2024). SEIKO : Journal of Management & Business Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7(2), 543–555.
- Putri Pramesdya, R., & Arifin, Z. (2025). The Effect of Poverty, PDRB ADHK, UMP, RLS on Inclusive Development in Disadvantaged Provinces in Indonesia. In *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* (Vol. 09, Issue 02).
- Qur'ani, B., Hadis, A., Anshar, M. A., & Pala, R. (2016). Analysis of Social Inequality and Education Level in South Sulawesi Province, Indonesia. *Research Studies*, 3(7), 1297-1303.
- Riyanti Hufaini, A. S. F., Raupong, R., & Ilyas, N. (2020). Regresi Model Data Panel Efek Tetap dengan Metode Within Group pada Data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. *ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.20956/ejsa.v1i1.9276>
- Sabrina, S. M., & Setiawan, T. H. (2025). Clustering Analysis Of Provincial In Indonesia Based On The 2023 Human Development Index Indicators Using The K-Medoids Algorithm. *Jurnal Matematika UNAND*, 14(1), 93–102. <https://doi.org/10.25077/jmua.14.1.93-102.2025>
- Sanusi, W., Irwan, I., Arkas, A. N., & Rusli, R. (2023). Pemodelan Angka Buta Huruf di Provinsi Sulawesi Selatan Menggunakan Geographically Weighted Regression. *ARRUS Journal of Mathematics and Applied Science*, 3(2), 55–64. <https://doi.org/10.35877/mathscience2144>
- Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. In *Graha Ilmu* (Vol. 4, Issue 3). <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>
- Siregar, S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Kencana Prenadamedia.
- Subair, A. (2025). Etnopedagogi Sulawesi Selatan: Pembelajaran Nilai Sejarah Lokal. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 1255-1265.
- Syaidatussalihah, S., Mala, F., Permata, R. A., & Khalil, A. A. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2023. *JSN: Jurnal Sains Natural*, 3(1), 20–26. <https://doi.org/10.35746/jsn.v3i1.699>
- Syam, F., Aina, A. N., & Syafrin, N. S. R. (2024). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa: Analisis Politik Pendidikan. *Celebes Journal of Elementary Education*, 2(2), 83-91.

Yeni, Ririt Iriani Sri Setiawati, Mohammad Wahed, & Eko Hardiyanto. (2025). Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2020. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* Vol. 6, No. 2, April 2025.